

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada triwulan II 2026, Provinsi Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 0,28% (mtm), lebih rendah dibanding inflasi nasional. Berdasarkan hal tersebut maka secara tahunan inflasi Jawa Barat menjadi 3,08% (yoy). Inflasi Jawa Barat pada bulan Juni 2026 terutama bersumber dari kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,21%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi (mtm) yaitu bensin sebesar 0,21%,. **Di sisi lain, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran juga tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,03% (mtm).**

Secara spasial, seluruh Kab/Kota pantauan IHK di Jawa Barat mengalami inflasi (yoy). Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Majalengka sebesar 3,4% dengan IHK dengan IHK sebesar 112,29 dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Subang sebesar 2,6% dengan IHK sebesar 113,05. Di sisi lain, apabila dilihat secara mtm, inflasi tertinggi terjadi di Kota Depok sebesar 0,42% dan inflasi terendah terjadi di Kota Tasikmalaya sebesar 0,03%.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah, TPID Provinsi Jawa Barat memiliki program kerja strategis berdasarkan *roadmap* pengendalian inflasi di daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait fluktuasi harga yang terjadi selama Triwulan-II 2026 yaitu:

1. Pasca hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, beberapa komoditas pangan seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit mengalami penurunan harga;
2. Penurunan harga jual sapi dibawah HPP akibat Trump Tarrif dan melemahnya kurs rupiah terhadap dollar;
3. Peningkatan harga beras, bawang merah, tomat dan wortel akibat musim kemarau yang mulai terjadi pada Bulan Juni;
4. Kenaikan harga bawang putih akibat gejolak nilai tukar rupiah yang masih belum stabil;
5. Kenaikan harga minyak goreng akibat gejolak harga minyak sawit mentah (CPO);
6. Terbatasnya supply Minyakita dan adanya kebocoran distribusi menyebabkan harga Minyakita diatas HET;
7. Kenaikan harga plastik menyebabkan kenaikan harga komoditas yang menggunakan kemasan berbahan baku plastik, diantaranya minyak goreng;
8. Alih fungsi lahan menyebabkan penurunan produksi pangan dan hortikultura;
9. Krisis energi akibat konflik geopolitik yang terjadi di timur tengah memicu kenaikan harga energi di dalam negeri, diantaranya bahan bakar rumah tangga (LPG non subsidi), avtur, bahan bakar minyak non subsidi;
10. Meningkatnya harga BBM Non Subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green 95 pada Juni 2026;
11. Harga emas di pasar global menunjukkan tren penurunan dibandingkan pada Triwulan-I.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga laju inflasi agar selalu berada dalam *range* target yang telah ditetapkan, TPID Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai

berikut yaitu sbb:

(K1) Keterjangkauan Harga

1. Survei Harga Pangan Strategis di Pasar 27 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan setiap bulan;
2. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sampai dengan Juni 2026 sebanyak 555 kali;
3. Pasar murah menjelang HBKN Idul Adha tanggal 20 - 22 Mei di 6 lokasi berbeda dengan melibatkan 98 pelaku usaha dan dihadiri oleh lebih dari 5.921 pengunjung
4. Pasar Tani sampai dengan Juni 2026 sebanyak 10 kali;
5. Pasar Leuweung telah dilaksanakan sebanyak 2 kali sampai dengan Juni 2026;
6. Bazar Perikanan sebanyak dengan Juni 2026 8 kali;
7. Penyaluran beras SPHP hingga Juni 2026 sebanyak 42.710.800 Kg;
8. Penyaluran bantuan pangan hingga 30 Juni 2026 sebanyak 121.607.440 Kg beras dan 24.321.488 liter minyak goreng;
9. Pemantauan Harga Pangan di SILINDA JABAR secara harian.

(K2) Ketersediaan Pasokan

1. Pengelolaan CPPD oleh BULOG per 3 Juli 2026, dengan rincian sebagai berikut:
 - CPPD Provinsi sebesar 2.623,33 beras dan
 - CPPD Kabupaten/Kota antara lain:
 - Beras: 2.660,48 ton
 - Gabah: 36,16 ton
 - Minyak Goreng: 42,70 KL
 - Gula Pasir: 21,07 ton
 - Telur ayam: 26,27 ton
2. Pengadaan beras hingga 30 Juni 2026 sebanyak 544.914,73 ton setara beras;
3. Pengadaan jagung hingga 30 Juni 2026 sebanyak 7.096,90 ton setara jagung;
4. Pemantauan stok pangan melalui Neraca Pangan pada 27 Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
5. Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, peningkatan indeks pertanaman, penggunaan benih unggul, penyediaan sarana produksi pertanian, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penguatan sistem irigasi, serta penerapan teknologi budidaya yang lebih efektif dan efisien;
6. peningkatan produksi peternakan, khususnya komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi daerah, seperti daging ayam ras, telur ayam ras dan daging sapi melalui pelatihan kapasitas teknis dan manajerial;
7. penguatan kelembagaan ternak dan koperasi peternak;
8. peningkatan produksi perikanan dilakukan melalui penyediaan benih bermutu, peningkatan penerapan teknologi budidaya, penguatan sarana dan prasarana produksi, serta pendampingan teknis kepada pembudidaya ikan, penguatan sarana penangkapan ikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

(K3) Kelancaran Distribusi

1. Fasilitasi Distribusi Pangan sebanyak 550.00 Kg;
2. Optimalisasi distribusi pangan di 135 Kios Pangan;
3. Mobil Pangan Keliling Jawa Barat (Mobil Paling Jawara) sampai dengan Juni 2026

dilaksanakan sebanyak 22 kali;

4. Penandatanganan KAD antara Kabupaten Karimun (Provinsi Kepulauan Riau) dengan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi pada 21 Mei 2026.

(K4) Komunikasi Efektif

1. *Capacity Building* TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebanyak 2 kali dilaksanakan pada 8 April 2026 dan 2 – 5 Juni 2026;
2. Rapat Koordinasi Kegiatan Pasar Murah Menjelang HBKN Idul Adha tahun 2026 pada 7 April 2026;
3. Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) "Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam rangka mengantisipasi ketersediaan dan harga komoditas bawang merah dan cabai rawit merah di Jawa Barat pada 17 April 2026;
4. Rapat Koordinasi Menjelang HBKN Idul Adha pada 18 Mei 2026;
5. *Focus Group Discussion* (FGD) Studi Kelayakan Food Hub Provinsi Jawa Barat pada 17 Juni 2026;
6. *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 pada 19 Juni 2026;
7. Rapat Koordinasi Distribusi Telur Ayam Ras di Jawa Barat pada 25 Juni 2026;
8. Pendampingan kepada Kabupaten/Kota;
9. Pertemuan Penyampaian Laporan Perkembangan Harga Komoditas Pangan Strategis serta Upaya Pengendalian Inflasi oleh Tim Teknis Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SILINDA JABAR) sebanyak 3 kali selama Triwulan II;
10. Pembahasan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SILINDA JABAR) dengan aplikasi SmartJabar pada 21 April 2026 dan Pembahasan Integrasi SILINDA JABAR dengan aplikasi Sindang Priatim milik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya pada tanggal 30 Juni 2026;
11. Pengembangan Aplikasi SILINDA JABAR.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Jawa Barat secara umum berdampak dalam menekan laju inflasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi ke depannya seperti:

1. Terjadinya alih fungsi lahan yang mengurangi area produksi atau luas panen tanaman pangan dan hortikultura;
2. Masih terbatasnya pasokan Minyakita ke wilayah Jawa Barat sehingga memicu kekosongan stok di sejumlah pasar rakyat;
3. Masih tingginya kehilangan hasil (*loss*) yang berpotensi terhadap penurunan hasil produksi pangan;
4. Terjadinya kebocoran pada rantai distribusi dan terbatasnya pasokan Minyakita yang masuk ke wilayah Jawa Barat;
5. Adanya kekosongan stok Minyakita di beberapa pasar rakyat serta harga jual yang sering berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), terutama di pasar non-pantauan;
6. Dampak perubahan iklim yang berpotensi menurunkan jumlah hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura secara drastis;
7. Kondisi produksi ayam hidup (*live bird*) dan telur ayam ras yang melebihi kebutuhan

- (*oversupply*) menyebabkan harga di tingkat produsen menurun;
8. Tekanan ekonomi global berupa pelemahan kurs rupiah terhadap dollar Amerika dan kebijakan perdagangan internasional seperti tarif Trump turut mempengaruhi harga komoditas pangan, khususnya komoditas impor seperti daging sapi dan bawang putih;
 9. Tingginya permintaan (*demand*) masyarakat terhadap produk pangan strategis yang tidak selalu dapat diimbangi oleh suplai yang ada, khususnya pada momen HBKN.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah kebijakan yang diambil oleh TPID Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian inflasi selama periode Triwulan-II 2026 di antaranya :

1. Memberikan bantuan sarana produksi, berupa benih padi yang toleran kekeringan, benih cabai (rawit dan keriting), serta pupuk (subsidi, cair, P, dan KNO₃), mulsa kepada petani dan kelompok tani.
2. Memberikan bantuan sarana pertanian, berupa alat mesin pertanian seperti rice transplanter, rotavator, dan traktor untuk mempercepat proses tanam.
3. Menangani kehilangan hasil (*loss*), melalui pemberian bantuan sarana pasca panen berupa *combine harvester* dan *power thresher* guna menekan angka kehilangan hasil saat panen.
4. Memperbaiki jaringan irigasi serta memberikan bantuan irigasi perpompaan, perpipaan, dan pompa air untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.
5. Mempercepat pemenuhan stok Minyakita, terutama dengan memprioritaskan penyaluran ke pasar-pasar rakyat terlebih dahulu.
6. Memaksimalkan penyerapan stok *live bird* (ayam pedaging) dan telur ayam ras melalui integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pasar murah untuk menyelamatkan peternak dari risiko kerugian atau tutup usaha.
7. Melakukan pengawasan ketat terhadap label kemasan dan alur distribusi Minyakita guna mencegah kebocoran serta praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), terutama di pasar non-pantauan.
8. Melakukan penyesuaian Peraturan Harga Acuan Pembelian dan Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat produsen dan konsumen sebagai respons terhadap tekanan eksternal, seperti pelemahan kurs rupiah dan kebijakan tarif internasional.
9. Menetapkan Kawasan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) secara spasial di setiap Kabupaten/Kota dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat Kabupaten/Kota serta Provinsi.
10. Melakukan penanaman bawang putih seluas 360 Ha, dimana saat ini masih dalam tahap verifikasi lahan.
11. Menerapkan kebijakan pembatasan distribusi *Grand Parent Stock* (GPS) komoditas ayam yang beredar untuk mencegah terjadinya kelebihan pasokan di masa mendatang.
12. Mengembangkan kawasan bawang merah dan aneka cabai secara berkelanjutan di berbagai daerah sentra produksi dan prioritas.